

Problematika Peran MGMP dalam Implementasi KMA 183 dan KMA 184 Tahun 2019

Elfa Tsuroyya

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota, Yogyakarta

elfatsuroyya@gmail.com

Abstract

The subject of Islamic Cultural History undergoes many curriculum changes that continue to move dynamically. One of these changes is the emergence of KMA 183 and KMA 184 in 2019. This article aims to reveal the problems faced by MGMP SKI MA DIY in implementing KMA 183 and KMA 184 in 2019. Qualitative research with descriptive-analytical methods is the type of research used. Data analysis using analytic-qualitative type. The research location was taken in Yogyakarta with the subject of MGMP SKI MA DIY having its address at PSBB MAN 3 Sleman Jl. Magelang KM 3.5 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta. Structured interviews, documentation and observation carried out the data collection technique. A triangulation test is used to ensure the reliability of the data obtained. The results showed that the problems faced by teachers in the learning process were divided into three aspects: problems in socializing policy implementation, problems in implementing policy implementation, and problems in monitoring policy implementation.

Keywords: *The Problems of the Role of MGMP, Implementation of KMA 183 and KMA 184*

Abstrak

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mengalami banyak perubahan kurikulum yang terus bergerak dinamis. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya KMA 183 dan KMA 184 Tahun 2019. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap problematika yang dihadapi MGMP SKI MA DIY dalam pengimplementasian KMA 183 dan KMA 184 Tahun 2019. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang digunakan. analisis data menggunakan jenis analitik-kualitatif. Lokasi penelitian diambil di Yogyakarta dengan subyek MGMP SKI MA DIY yang beralamat di PSBB MAN 3 Sleman Jl. Magelang KM 3.5 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur,

Dokumentasi dan observasi. Uji Triangulasi digunakan untuk memastikan keandalan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan problematika yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran terbagi menjadi 3 aspek yaitu problematika dalam sosialisasi implementasi kebijakan, problematika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, serta problematika dalam monitoring implementasi kebijakan.

Kata kunci: Problematika Peran MGMP, Implementasi KMA 183 dan KMA 184

Pendahuluan

Sejarah mengajarkan tentang apa yang baik dan buruk di masa lalu sehingga dapat mengubahnya menjadi lebih baik di masa depan. Sedangkan proses pendidikan merupakan sarana yang paling umum untuk memperoleh pengetahuan ini. Akibat dari hal tersebut di atas, bidang kajian sejarah budaya Islam merupakan bidang kajian yang cukup signifikan untuk dikaji di berbagai lembaga pendidikan Islam yang ada saat ini.

Transmisi budaya dari generasi ke generasi merupakan salah satu pilar utama pendidikan. Di era modern ini, semua negara telah berusaha dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, karena pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat suatu negara. Hal ini akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mampu mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien sebagai hasil dari pendidikan yang berkualitas. Dengan tersedianya sumber daya berkualitas tinggi, produktivitas negara secara alami akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyatnya. Segala proses yang dilakukan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan berbagai faktor yang terkait dengannya, guna

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, disebut sebagai peningkatan mutu pendidikan.¹

Dalam perkembangannya, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mengalami banyak perubahan kurikulum yang terus bergerak dinamis. Riset sebelumnya telah membahas banyak hal terkait kurikulum yang diterapkan dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Studi yang dilakukan Muammar menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik kurikulum 2013 di MAN 2 Jakarta sudah berjalan cukup baik. Implementasi pendekatan saintifik kurikulum 2013 dilakukan dengan langkah-langkah, diantaranya yaitu: 1) Mengamati, 2) Menanya, 3) Mengumpulkan, 4) Mengasosiasi/menalar, 5) Mengkomunikasikan. Di samping itu Langkah-langkah lain yang dilakukan adalah dengan mengirim guru dalam kegiatan MGMP. Guru juga melakukan tutor sejawat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa sehingga Siswa harus mempersiapkan diri sebelum belajar.²

Sujati dalam studi yang lain melakukan pemetaan terhadap materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pemetaan tersebut memberikan aspek kognitif dan informatif mengenai suatu cara bagaimana para stakeholder bisa mengembangkan materi pelajaran secara deskriptif-naratif sejarah dan kebudayaan Islam agar bisa dipahami oleh para siswa di tingkat Tsanawiyah.³

Manajemen kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Isu yang berkaitan dengan kondisi kelas yang sebenarnya selama proses pembelajaran, Guru menerapkan

¹ Rokhman Wakhid, "Analisis buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam kelas X."

² Mu'amar, "Implementasi Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Man 2 Jakarta."

³ Sujati, "Kurikulum dan Pembelajaran Pada Sejarah dan Kebudayaan Islam di MTs Kifayatul Akhyar Kota Bandung."

berbagai inovasi untuk memastikan kurikulum 2013 berhasil diterapkan. menyampaikan materi dalam berbagai cara, memperoleh pertanyaan dan tanggapan, melakukan pengembangan karakter siswa secara langsung, dan melakukan penilaian akademik dan perilaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen kurikulum 2013 dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam.⁴

Dalam studi yang lain Fahlevi menjelaskan mengenai macam-macam media yang dapat digunakan. Media tersebut antara lain media audio visual yaitu video atau film yang ditayangkan pada LCD dan laptop yang digunakan oleh guru, dan didukung dengan media visual berupa kertas-kertas yang disiapkan guru, juga papan tulis, buku paket yang sudah tersedia di dalam ruang pembelajaran.⁵

Dari sisi bahan ajar, Alhafidz menjelaskan isi materi SKI yang ada di buku teks terbitan Kemenag secara keseluruhan telah sesuai dengan kurikulum yang ada (sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar). Selain itu alur pembahasan tiap bab juga sudah tersusun secara sistematis dan materi yang ada di dalam buku juga telah sesuai dengan perkembangan usia, psikologi, dan kematangan pikiran siswa sehingga materi ini sudah layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran.⁶ Hal tersebut dikuatkan oleh temuan Muna yang menyatakan buku siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam telah menyajikan pembahasan yang cukup jelas, ringkas, dan mudah dipahami serta bisa mengedukasi dengan cukup baik. Dengan demikian, diharapkan bagi guru bisa menjadi pendidik yang berkualitas dan baik, sehingga bisa

⁴ Hasan dan Mutakim, "Manajemen Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MTs At-Taufiq Bogem Diwek Jombang."

⁵ Fahlevi, *Penggunaan Media pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Implementasi Kurikulum 2013 Kelas XI di MAN 2 Model Banjarmasin.*

⁶ Alhafidzh, "Analisis Materi Sejarah Kebudayaan Islam Pada Buku Teks Siswa Madrasah Tsanawiyah Kelas Vii Kurikulum 2013."

mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan.⁷

Meskipun demikian, studi yang dilakukan Syaifudin mengungkapkan Problematika pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yakni Pembelajaran di akhir jam pelajaran menjadi masalah tersendiri, siswa cenderung kurang bersemangat mengikuti pembelajaran setelah waktu dhuhur. Siswa masih kurang aktif ketika mengikuti diskusi. Guru mengajar lebih dari satu Mapel, hal ini menyebabkan guru kurang fokus dan terbebani.⁸

Dilain hal, Rofik mengungkapkan secara filosofis bahwa Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang mewujud dalam empat kategori, yaitu nilai material, nilai formal, nilai fungsional, dan nilai esensial.⁹ Oleh sebab itu, penting membangun pemahaman bahwa dalam buku teks Sejarah kebudayaan Islam madrasah Tsanawiyah kurikulum 2008 materi yang paling menonjol bukan politik, akan tetapi moral, kepercayaan serta upaya dan kebiasaan.¹⁰

Berdasar penjelasan di atas belum ada studi yang membahas secara spesifik mengenai problematika yang dihadapi MGMP dalam implementasi Kurikulum terbaru tersebut. MGMP memiliki peran yang sentral dalam proses implementasi kurikulum.¹¹ Untuk itu penting untuk menjelaskan problematika yang dihadapi MGMP SKI MA dalam pengimplementasian KMA 183 dan KMA 184 Tahun

⁷ Muna, "Analisis Materi Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam MA Kelas XI Terbitan Kemenag Kurikulum 2013."

⁸ Syaifudin, "Problematika pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menurut kurikulum 2013 di Kelas X MAN Salatiga."

⁹ Rofik, "Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Kurikulum Madrasah."

¹⁰ Rofik, "Konfigurasi Unsur-Unsur Kebudayaan Dalam Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah Sesuai Dengan Kurikulum 2008."

¹¹ Maure, Arifin, dan Datuk, "Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Sosiologi di Kota Kupang."

2019. Diharapkan dengan pembahasan mengenai problematika yang dihadapi MGMP SKI MA DIY ini dapat menjadi acuan bagi MGMP lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang digunakan. Analisis data menggunakan jenis analitik-kualitatif.¹² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk memperoleh makna dan pemahaman budaya subjek penelitian di mana peneliti adalah instrumen kunci.¹³ Lokasi penelitian diambil di Yogyakarta dengan subyek MGMP SKI MA DIY yang beralamat di PSBB MAN 3 Sleman Jl. Magelang KM 3.5 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, Dokumentasi dan observasi. Uji Triangulasi digunakan untuk memastikan keandalan data yang diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejalan dengan perubahan zaman yang begitu cepat dan tuntutan global harus diantisipasi dan direspons oleh dunia pendidikan. Perubahan tersebut akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara bersikap dan bertindak masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, madrasah melalui Kementerian Agama melakukan penyesuaian dengan regulasi terbaru. Implementasi kurikulum di madrasah mengacu kepada Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Keputusan Menteri Agama nomor 117 tahun 2014 tentang

¹² Cohen, Manion, dan Morrison, *Research Methods in Education*.

¹³ Creswell dan Creswell, *Research Design*.

implementasi kurikulum pada madrasah. Selanjutnya Dirjen Pendidikan Islam melakukan pemetaan dan penetapan madrasah untuk melanjutkan implementasi kurikulum 2013, sedangkan madrasah lain kembali menggunakan kurikulum 2006 dengan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab tetap menggunakan kurikulum 2013 sesuai KMA 165 tahun 2014 tentang implementasi kurikulum pada madrasah.¹⁴

KMA 165 tahun 2014 kemudian dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 yang tertuang dalam surat Dirjen Pendis Nomor; B-1264/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/07/2020. KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 bersifat penyempurnaan atas kurikulum yang telah berlaku sebelumnya, juga adanya perbaikan substansi materi pelajaran agar sesuai dengan perkembangan kehidupan abad 21.¹⁵

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab yang tertuang dalam KMA 183 tahun 2019 secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik itu terkait dengan akidah akhlak, syari'ah dan perkembangan budaya Islam, sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik dengan Allah Swt. maupun sesama manusia dan alam semesta.¹⁶ Pedoman Implementasi Kurikulum pada madrasah yang tertuang dalam KMA 184 tahun 2019 diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, Pengembangan Penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi

¹⁴ Direktorat pendidikan Madrasah, *Petunjuk teknis Pendampingan Kurikulum 2013*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 3.

¹⁵ Tertuang dalam surat Dirjen Pendis Nomor; B-1264/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/07/2020

¹⁶ Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019, *Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah, 2019), hlm. ii.

Beragama pada Madrasah.¹⁷ Tujuan dari diterbitkannya KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 adalah membawa perubahan pada pendidikan di madrasah agar lebih bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Kebijakan baru dalam dunia pendidikan yang tertuang dalam KMA 183 dan 184 tahun 2019 mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2020/2021. Pada semester pertama tahun pelajaran 2020/2021 hampir semua madrasah di Indonesia sudah mengimplementasikan kebijakan baru tersebut termasuk madrasah dari anggota MGMP SKI MA DIY. Dalam waktu yang relatif singkat tentu belum dapat teridentifikasi problematika yang berarti. Hal ini tersirat dari wawancara dengan ketua MGMP SKI MA DIY berikut:

“sampai saat ini, belum terlihat kendala yang terlalu berarti, walaupun muncul beberapa problem yang sifatnya kasuistik, bahkan bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut justru mempermudah guru dalam implementasinya di lapangan. Misalnya materi antara program reguler dan program keagamaan itu disamakan jadi kita tidak repot lagi menyiapkan banyak materi untuk kelas yang berbeda. Selain itu, kebijakan ini secara umum sangat sesuai dengan karakter materi SKI agar tidak hanya sekedar selesai sebagai cerita tetapi terutama peserta didik dapat mengambil *ibrah* dari setiap kejadian sebagai bekal karakter positif bagi peserta didik”¹⁸

Dalam dataran teori, kebijakan pendidikan KMA 183 dan KMA 184 khususnya mata pelajaran SKI MA diharapkan dapat membantu guru-guru SKI mengimplementasikannya di lapangan.

¹⁷ Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019, *Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah, 2019), hlm. ii.

¹⁸ Wawancara dengan Ketua MGMP SKI MA, tanggal 2 Januari 2021

Namun dalam praktiknya terlihat beberapa problem yang sifatnya kasuistik.

Problematika Dalam Sosialisasi Implementasi Kebijakan

Kegiatan sosialisasi implementasi KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 lebih sering dilakukan secara daring. Informasi yang tersampaikan dari kegiatan sosialisasi tersebut tidak dapat diterima secara menyeluruh oleh anggota dikarenakan keterbatasan sinyal dan kuota internet.

“karena semua serba daring, beberapa anggota MGMP mengikuti rapat sosialisasi tidak menyeluruh dan dilakukan dengan mengajar, akibatnya informasi yang diterima oleh para guru tidak utuh sehingga dalam pelaksanaan kegiatan banyak yang tidak memahami jadwal dan materi”

Demikian disampaikan oleh ketua MGMP SKI MA DIY, di samping hal itu ada sebagian anggota MGMP yang mengikuti sosialisasi di sela-sela mengajar, hal tersebut menjadi problem tersendiri karena tidak maksimal dalam memahami isi sosialisasi.

Bimbingan Teknis Implementasi KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 dilakukan secara virtual belum dapat berjalan secara optimal, karena sangat minim praktik. Jika dilakukan Bimbingan Teknis secara luring maka sangat dimungkinkan adanya waktu untuk melakukan praktik sehingga meminimalkan terputusnya informasi.

Seperti yang sudah menjadi pemahaman bersama bahwa hampir di seluruh belahan dunia sedang berjuang melawan pandemik. Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 lalu. Untuk meminimalisir merebaknya Covid-19, masyarakat diminta untuk menjalani protokol kesehatan dengan ketat dan memberlakukan *Work From Home and Learn at Home* serta menganjurkan

masyarakat untuk *stay at home*.¹⁹ Keadaan tersebut memaksa penulis untuk kreatif dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu beberapa data penelitian didapatkan dengan cara mengikuti Zoom meeting dengan pihak terkait maupun menggunakan media lain seperti WA, wawancara tertulis maupun Link Youtube resmi yang memang digunakan sebagai salah satu media sosialisasi kebijakan pendidikan yang tertuang dalam KMA 183-184 tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan pengurus MGMP SKI MA DIY.

Sosialisasi yang dilakukan oleh MGMP SKI MA DIY ini menjadi penting karena Direktorat KSKK Madrasah terus melakukan sosialisasi secara masif agar maksud dari kebijakan pendidikan segera mendapatkan respons dari masyarakat. Berbagai upaya berupa tindakan nyata dikomunikasikan sebagai bagian dari formulasi kebijakan yang diimplementasikan, salah satunya adalah informasi tentang inovasi dan fleksibilitas kurikulum yang tertuang dalam KMA 184 tahun 2019²⁰.

Langkah yang dilakukan terdiri dari dua poin utama yaitu Revolusi pembelajaran di Madrasah dan Madrasah diberi ruang Inovasi dan Kreasi menciptakan belajar bermutu dan bermakna. Revolusi pembelajaran terdiri dari Membuka ruang inovasi dan kreasi pengelola satuan pendidikan (pengawas, Kepala Madrasah dan Guru) dan meminimalisir administrasi GTK. Sedangkan pada aspek madrasah yang bermutu dan bermakna dapat dilakukan dengan melakukan rekayasa struktur kurikulum. Selain itu dengan memunculkan Mata Pelajaran yang dibutuhkan. Guru berkesempatan luas melakukan kolaborasi pembelajaran. Guru juga harus mengembangkan berpikir tingkat tinggi dan kreatif. Guru seharusnya juga memberi ruang luas kepada peserta didik

¹⁹ Tsuroyya, "New Normal di Masa Pandemi."

²⁰ Sumber dari materi dalam Bimbingan Teknis Implementasi KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019, zona Wilayah Indonesia Timur

untuk berprestasi dalam bidangnya. Guru bebas menentukan alat penilaian belajar yang bermutu.

Problematika dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Kurikulum dalam kebijakan baru disusun untuk kebutuhan pembelajaran normal, sementara implementasi KMA 183 dan 184 tahun 2019 bertepatan dengan adanya pandemi yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang berdampak pada diterapkannya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring pada semua madrasah. Hal ini berdampak pada kesiapan guru di lapangan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan juga materi bahan ajar yang harus disampaikan secara daring. Sementara itu MGMP SKI MA DIY belum mempunyai role model dalam pembelajaran daring.²¹ Role model disini adalah tersedianya contoh materi, perangkat pembelajaran lengkap dengan media pembelajaran yang direkomendasikan untuk dilakukan pada masa pandemi.

Belum memaksimalkan koordinasi antara kasi guru Kanwil Kemenag DIY dengan MGMP SKI MA DIY terkait implementasi KMA 183 dan 184 tahun 2019 sehingga MGMP terkesan berjalan sendiri. menurut kasi guru Kanwil DIY hal ini dikarenakan seksi guru tidak menyentuh tentang sosialisasi KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 dan fokus pada supporting kegiatan MGMP untuk mempersiapkan guru-guru agar dapat mengawal pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Padahal implementasi menjadi kunci dalam proses sebuah program. Grindle menjelaskan indikator keberhasilan dalam Implementasi adalah dengan melihat konsistensi pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Grindle juga

²¹ Hasil observasi dengan beberapa anggota MGMP SKI MA dalam salah satu kegiatan pertemuan rutin

memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana hasil akhir ditentukan oleh salah satunya adanya interaksi dengan pembuat program.²²

Problematika dalam Monitoring Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan baru satu semester, sehingga monitoring implementasi dengan cara FGD baru berjalan ala kadarnya. Beberapa angket yang disebar juga tidak mendapatkan respons yang positif dari anggota MGMP dikarenakan kesibukan dan keterbatasan jaringan internet;

“Beberapa kali kita sebar angket untuk menjangkau informasi dari anggota MGMP terkait pelaksanaan di lapangan, tapi ya begitulah beberapa anggota tidak mengisi dan menyerahkan angketnya, ada yang beralasan sibuk, gaptek, dan lainnya”.

Walaupun begitu, monitoring tetap dilakukan dengan harapan akan membawa perbaikan dalam program-program MGMP yang akan mendukung terlaksananya implementasi kebijakan dengan lebih baik

Berdasar data diatas penting untuk diperhatikan bahwa monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung. monitoring dilakukan oleh seorang pemimpin yang berfungsi pada pengendalian.²³ Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab pertanyaan mengapa kebijakan atau suatu program pada tahap tertentu dapat menghasilkan konsekuensi demikian.²⁴ Menurut Nanang Fatah, ada empat fungsi monitoring kebijakan

²² Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*.

²³ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*, 174.

²⁴ Hadi, “Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam Dan Pendidikan Sekuler,” 111.

pendidikan: a) Kepatuhan; yaitu membantu menentukan apakah kegiatan sesuai dengan standar prosedur yang telah dibuat. b) *Auditing*; menentukan apakah tepat sasaran. c) *Akunting*; menghasilkan informasi yang membantu dalam akunting. d) Penjelasan/eksplanasi; menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa *outcome* dari kebijakan dan programnya berbeda.²⁵

Ke depan, monitoring membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Untuk mendapatkan data dan informasi dapat diperoleh dengan berbagai metode pengumpulan data. Langkah yang dilakukan dapat dengan metode dokumentasi, dapat diperoleh dari laporan kegiatan, baik laporan tahunan, semesteran maupun bulanan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan metode survei. Hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu seperangkat instrumen pertanyaan yang bertujuan untuk menjangkau data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran. Metode observasi lapangan dapat dilakukan bertujuan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang bervariasi. Dengan cara demikian, diharapkan berbagai informasi yang lebih valid dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari banyak sumber. Dapat pula dengan metode campuran dari beberapa metode di atas.²⁶

²⁵ Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 204.

²⁶ Hadi, "Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam Dan Pendidikan Sekuler," 116.

Simpulan

Secara umum problematika yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu problematika dalam sosialisasi implementasi kebijakan, problematika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, serta problematika dalam monitoring implementasi kebijakan. Ke depan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat lebih jeli dalam membedah masing-masing aspek dalam problematika yang dihadapi MGMP SKI MA sehingga diharapkan proses implementasi kurikulum dapat berjalan maksimal.

Daftar Pustaka

- Alhafidzh, Muhammad Faza. "Analisis Materi Sejarah Kebudayaan Islam Pada Buku Teks Siswa Madrasah Tsanawiyah Kelas Vii Kurikulum 2013." *PANDAWA 2* (2020): 240–54.
- Cohen, Louis, Lawrence Manion, dan Keith Morrison. *Research Methods in Education*. 8th edition. London ; New York: Routledge, 2017.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2018.
- Fahlevi, R. *Penggunaan Media pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Implementasi Kurikulum 2013 Kelas XI di MAN 2 Model Banjarmasin*. idr.uin-antasari.ac.id, 2019. <https://idr.uin-antasari.ac.id/12183/2/AWAL.pdf>.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press, 2017.

- Hadi, Hasbullah. "Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam Dan Pendidikan Sekuler." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (28 Oktober 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.304>.
- Hasan, M S, dan M Mutakim. "Manajemen Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MTs At-Taufiq Bogem Diwec Jombang." *Al-Idaroh: Jurnal Studi ...*, 2019. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/104>.
- Maure, Fransisca Susanti, Arifin, dan Amirulah Datuk. "Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Sosiologi di Kota Kupang." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 12, no. 2 (15 Januari 2021): 111-18. <https://doi.org/10.37640/jip.v12i2.534>.
- Mu'ammad, M F. "Implementasi Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Man 2 Jakarta." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52222>.
- Muna, Ani Roisatul. "Analisis Materi Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam MA Kelas XI Terbitan Kemenag Kurikulum 2013." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 1-13. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i1.2188>.
- Rofik, Rofik. "Konfigurasi Unsur-Unsur Kebudayaan Dalam Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah Sesuai Dengan Kurikulum 2008." *Jurnal Pendidikan Agama*

Islam 13, no. 1 (2017): 1–18.
<https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-01>.

———. “Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Kurikulum Madrasah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 12, no. 1 (2015): 15–30. <https://doi.org/10.14421/jpai.2015.121-02>.

Rokhman Wakhid, Abdur. “Analisis buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam kelas X.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10839/>.

Rusdiana, Ahmad. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filososfi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sujati, B. “Kurikulum dan Pembelajaran Pada Sejarah dan Kebudayaan Islam di MTs Kifayatul Akhyar Kota Bandung.” *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 2019. <http://jurnal.stkipadhaku.ac.id/index.php/sinau/article/view/49>.

Syaifudin, Muhammad. “Problematika pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menurut kurikulum 2013 di Kelas X MAN Salatiga.” Undergraduate, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5084/>.

Tsuroyya, Elfa. “New Normal di Masa Pandemi.” *senayanpost.com*, 18 Mei 2020. <https://www.senayanpost.com/new-normal-di-masa-pandemi>.